

MAHASISWA SEBAGAI KEKUATAN POLITIK DI ERA DIGITAL

ZAKARIA HABIB AL-RA'ZIE^{1*}, APRIYANTO²

Universitas Pamulang^{1,2}

Email: zakaria@unpam.ac.id^{1,*}

Abstract: *The digital era brings great changes to society, including in the social and political life of a country. The political dynamics that occur in the digital space can be more dynamic and harsh than in the conventional space. This is due to the ease of public access to voice their opinions on political issues and policies taken by awa government. This shows that the limitations of conventional political space do not apply in the digital political space. One of the political actors who has a big role in the digital space is students. As agents of change, students are morally and intellectually responsible to ensure that the country is on the right path for the benefit of the general public. Among the ways they are through active contributions in voicing opinions using digital instruments that are very mastered, namely social media. In this regard, the researcher is interested in researching the political dimension of students in the digital era. More specifically, this research was conducted to understand what the role of students as political forces in the digital era looks like. This research uses a qualitative method. The data collection technique is carried out through literature study and the data analysis technique used is descriptive analytical. The results of this study found that, in the digital era, students use their political power to mobilize action through various creative ways through social media that are very familiar to their daily lives. The role of students in this context cannot be underestimated, because the impact can be more significant than traditional movements. This is because the digital space is able to keep issues relevant and expand their reach as long as people are connected to the internet, and this creates political movements that are in line with the spirit of the times.*

Keywords: *Students; Political Forces; Digital.*

Abstrak: Era digital membawa perubahan besar pada masyarakat, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik di suatu negara. Dinamika politik yang terjadi di ruang digital bisa lebih dinamis dan keras ketimbang dalam ruang konvensional. Hal tersebut disebabkan kemudahan akses masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya mengenai isu politik dan kebijakan yang diambil pemerintah. Hal tersebut menunjukkan batasan yang dimiliki ruang politik konvensional tidak berlaku dalam ruang politik digital. Salah satu aktor politik yang memiliki peran besar dalam ruang digital adalah mahasiswa. Sebagai *agent of change* mahasiswa bertanggungjawab secara moral dan intelektual untuk memastikan negara berjalan di jalan yang benar untuk kepentingan masyarakat umum. Di antara cara-cara mereka lewat kontribusi aktif dalam menyuarakan pendapat dengan menggunakan instrumen digital yang sangat dikuasai yaitu media sosial. Terkait hal tersebut, penelitian ini menjelaskan dimensi politik mahasiswa pada era digital. Secara lebih spesifik penelitian ini dilakukan untuk memahami seperti apa peran mahasiswa sebagai kekuatan politik di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, di era digital, mahasiswa menggunakan kekuatan politik mereka untuk menggerakkan aksi melalui beragam cara kreatif lewat media sosial yang sangat akrab dengan keseharian mereka. Peran mahasiswa dalam konteks ini tidak bisa dianggap remeh, karena dampaknya bisa lebih signifikan dibandingkan gerakan tradisional. Sebab, ruang digital mampu menjaga isu tetap relevan dan memperluas jangkauannya selama masyarakat terhubung dengan internet, dan hal ini menciptakan gerakan politik yang sejalan dengan semangat zaman.

Kata Kunci: Mahasiswa; Kekuatan Politik; Digital.

A. Pendahuluan

Saat ini dunia sudah masuk pada era perkembangan teknologi yang canggih, ditandai dengan berbagai macam penemuan mesin-mesin, komputer hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*) yang memberikan dampak besar pada kehidupan manusia. Masyarakat di berbagai Negara saat ini sudah akrab dengan produk turunan dari teknologi canggih tersebut seperti internet yang

memungkinkan orang-orang untuk saling terhubung dengan mengabaikan batas-batas fisik dan teritori Negara. Mereka bisa saling berkomunikasi dan menjalin relasi melalui *platform* media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube dan lain sebagainya. Kemudahan akses dan kemampuan jangkauan yang luas tersebut turut memberikan warna dan dinamika khusus dalam bidang sosial dan politik seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, kritik politik, penyampaian aspirasi dan evaluasi kebijakan publik oleh rakyat.

Di antara banyak kekuatan politik yang berperan salah satunya adalah mahasiswa. Definisi umum mahasiswa adalah orang yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi, baik di Universitas maupun Institut (Dudih Sutrisman, 2019, p. 115). Hal ini sama dengan definisi administratif yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 16 bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi (Kementerian Hukum dan HAM, 2012, p. 5). Dengan definisi tersebut, yang disebut mahasiswa adalah siapa pun yang secara resmi terdaftar pada perguruan tinggi dengan mengabaikan apa pun latar belakang serta status sosial yang dimiliki.

Selain definisi teknis tersebut ada pula yang mendefinisikan mahasiswa secara lebih substansial yaitu merupakan anak muda yang disiapkan menjadi calon pemimpin yang akan memimpin perubahan di masa depan. Pada konteks ini mahasiswa mengambil peran sebagai subjek perubahan dan penyelesaian masalah serta menjadi penghubung antara suara rakyat dengan para penguasa (Fresky, 2020, p. 3). Dengan definisi-definisi tersebut mahasiswa diperhitungkan sebagai aktor yang mengambil peran dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Sebagai definisi teknisnya tugas mahasiswa adalah untuk belajar. Namun pembelajaran tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan akademik berupa ijazah dan gelar untuk kemudian melamar pekerjaan. Terlepas apa pun bidang ilmu yang dipilih untuk dipelajari mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga kehidupan masyarakat dan jalannya pemerintahan berada dalam kondisi yang baik. Misalnya kesadaran tentang politik bukan hanya dimiliki oleh mahasiswa dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, melainkan seluruh mahasiswa harus memiliki kesadaran tentang hal tersebut. Sebagaimana perannya sebagai agen perubahan mahasiswa dituntut untuk mampu membawa perubahan yang semakin baik dalam setiap bidang yang dipilih dan dikuasai.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mahasiswa harus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat, mahasiswa tidak boleh berada di menara gading yang hanya nyaman tinggal dalam ruang-ruang kelas dan gedung kampus, mereka harus terhubung langsung dengan masyarakat, merasakan apa yang dirasakan masyarakat, mengetahui apa yang dihadapi dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan persoalan politik atau jalannya kekuasaan di pemerintahan. Seperti yang dikatakan guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge Inggris, Lord Acton, bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak pasti korup (Purboadji, 2015, p. 19). Pandangan tersebut menyatakan bahwa kekuasaan butuh untuk diawasi supaya tidak keluar jalur dan menjadi bencana untuk masyarakat, ibarat bola salju besar yang menggelinding tidak terkendali.

Pada konteks pengawasan tersebut, mahasiswa dapat mengambil peran sebagai pelaku perubahan (Dudi Akbar & Samudera, 2018, p. 18) yang memiliki kekuatan yang dapat menjaga, memberi peringatan, bahkan memperbaiki arah layar kapal bernama negara agar berlayar dengan baik menuju tujuan bersama atau cita-cita nasional yang tertuang dalam butir-butir Pancasila. Kekuatan tersebut dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa memahami dengan kritis setiap kebijakan pemerintah atau keputusan politik penguasa serta mengukur dampaknya untuk rakyat. Contoh konkret kekuatan politik mahasiswa adalah gerakan reformasi 1998 ketika mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan melakukan demonstrasi besar menuntut penguasa orde baru, Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan akibat dinilai sudah terlalu korup, karena korupsi yang dilakukan bukan hanya melibatkan individu melainkan dilakukan secara terlembaga (Edy Herry Pryhantoro & Sopyan, 2016). Gerakan ini kemudian mendorong terjadinya reformasi dan perubahan besar dalam tatanan politik di Indonesia.

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara lain mahasiswa juga mengambil peran sebagai kekuatan politik, misalnya gerakan mahasiswa China pada tahun 1989 yang dikenal

dengan unjuk rasa besar di Lapangan Tiananmen saat mahasiswa menuntut reformasi politik agar mendapatkan kebebasan politik yang lebih besar untuk rakyat (BBC News, 2019).

Contoh lainnya adalah demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa belasan kampus di Amerika Serikat yang menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas di Gaza dan pemisahan kampus dengan perusahaan apa pun yang terkait dengan upaya militer Israel di Gaza. Mahasiswa yang berunjuk rasa berasal dari kampus antara University of Texas di kota Austin, University of Minnesota, University of Columbia, University of Southern California, Harvard University, Emerson College, University of Michigan, New York University, Northwestern University, George Washington University, Yale dan banyak lainnya. Demonstrasi besar tersebut bahkan membuat Ketua DPR Amerika Serikat menuntut Presiden Universitas Columbia Minouche Shafik mengudurkan diri akibat terus meluaskan aksi demonstrasi mahasiswa (Michael Brown, 2024).

Ketiga contoh tersebut merupakan unjuk rasa dan penyampaian aspirasi yang dilaksanakan secara langsung atau konvensional. Namun dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini penyampaian aspirasi sudah semakin mudah, murah, lebih terbuka dan lebih kreatif dengan memanfaatkan berbagai *platform* media sosial atau ruang digital. Misalnya lewat gerakan tagar di *platform* X (eks twitter) dan instagram, termasuk penggunaan istilah-istilah khusus, mengubah lirik lagu, membuat gambar dan aktivitas kreatif lain sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Misalnya gerakan tagar #GejayanMemanggil, gerakan ini merupakan seruan aksi damai yang dilakukan mahasiswa dari beberapa kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu yang akan disuarakan terkait kondisi politik-hukum di Indonesia seperti RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan serta RUU Pertahanan (Devi, 2019). Kemudian ada juga gerakan perang tagar antara #MahasiswaBergerak versus #SayaBersamaJokowi menjelang aksi demonstrasi mahasiswa yang mendesak Presiden Joko Widodo menolak wacana perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu. #SayaBersamaJokowi sempat menjadi top trending topik pertama di Indonesia dengan sekitar 136.000 *mentions* dari 11.700 pengguna, mengalahkan #MahasiswaBergerak sebesar 84.900 *mentions* dengan 14.900 pengguna (BBC News, 2022).

Gerakan politik yang dilakukan mahasiswa lewat media sosial seperti aksi tagar dapat berlanjut menjadi gerakan riil demonstrasi konvensional di jalanan yang dapat membawa efek lebih jauh. Namun dengan keleluasaan dan keterjangkauan yang dimiliki, gerakan politik lewat *platform* digital dapat berlangsung lebih lama dan lebih kuat, dan pesannya bisa menjangkau siapa pun selama terhubung dengan internet dan media sosial. Misalnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David akibat persoalan asmara yang kemudian berujung pada pengusutan kasus korupsi yang dilakukan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI yang merupakan ayah dari Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo (Tim detikcom, 2023). Masalah ini pun mengundang perhatian nasional yang memberikan efek lanjutan terhadap Kementerian Keuangan dan pejabat di bawahnya yang dinilai masyarakat hidup bergelimang harta secara tidak wajar. Kasus ini kemudian ikut menyeret mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi (Yahya, 2023). Berdasarkan hal tersebut, identifikasi masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini tentang peran mahasiswa sebagai kekuatan politik di era digital yang menjalankan aktivitas politiknya secara kreatif melalui sarana-sarana digital seperti media sosial. Ini bisa disebut sebagai gerakan politik model baru yang lebih modern yang khas dengan gaya anak muda yang lahir, besar dan akrab dengan teknologi.

Penelitian sebelumnya seperti karya Rahmaudina Al Khanzah, Retno Retnawati, Ricky Aji Pradana, Moh. Ishomuddin Ihsan yang berjudul Mahasiswa dan Intelektual sebagai Kekuatan Politik: Studi atas Gerakan Mahasiswa terhadap Penolakan Kebijakan UU Ciptaker. Studi ini menganalisis peran mahasiswa sebagai kekuatan politik di Indonesia. Peneliti menekankan pentingnya mahasiswa sebagai agen perubahan, terutama saat sistem pemerintahan mengalami krisis. Masyarakat berharap suara mereka dapat disampaikan melalui gerakan mahasiswa. Pada tahun 2020, terjadi demonstrasi besar menentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana mahasiswa menganggap UU tersebut memiliki banyak kelemahan, seperti mengurangi perlindungan pekerja dan mempermudah pemecatan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pencabutan UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan banyak pihak, termasuk tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta mengumpulkan data melalui penelitian pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel (Al Khanza et al., 2024, p. 117). Kemudian karya Anggun Putri

Fatmala dan T Heru Nurgiansah yang berjudul *Kekuatan Politik Mahasiswa Sebagai Agent of Change* terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Sistem Politik. Menurut Anggun dan Heru, partisipasi politik adalah alat untuk melegitimasi negara demokratis. Kehidupan sosial masyarakat tidak terlepas dari pengaruh politik. Situasi politik di Indonesia mempengaruhi berbagai kondisi sosial, seperti ekonomi dan budaya, yang memungkinkan kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat. Di Indonesia, isu politik sering memicu konflik kepentingan, termasuk korupsi dan integritas pelayanan publik, yang dapat mempengaruhi elite politik. Pertanyaan muncul mengenai hubungan antara berita *hoax* dan kepentingan politik, serta dampak sistem *output* terhadap kepentingan masyarakat dan *input* dari pemerintah. Hal ini menjadi perhatian mahasiswa, yang memiliki hak untuk menilai dan mengawasi tindakan penguasa yang menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka (Fatamala & Nurgiansah, 2023, p. 74).

Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kekuatan politik dan teori budaya politik. Maurice Duverger (1982) mendefinisikan kekuasaan politik sebagai kekuatan untuk mengatur masyarakat (Haboddin, 2017, p. 5). Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa arah gerak masyarakat sangat ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan politik. Terdapat banyak sumber yang bisa diakses untuk memperoleh kekuasaan politik, mulai dari status sosial di masyarakat, kekayaan, pengetahuan dan relasi. Serta terdapat banyak cara untuk bisa memperoleh kekuasaan tersebut mulai dari warisan, paksaan, hingga pemilihan dalam proses demokratis. Kekuatan politik ini dimiliki oleh pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang digolongkan ke dalam konsep kekuatan-kekuatan politik. Secara praktis, kekuatan-kekuatan politik adalah pihak-pihak atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi politik dan semua hal yang terkait dengan politik. Hal-hal tersebut antara lain mulai dari perumusan kebijakan publik, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi kebijakan.

Kemudian teori budaya politik menurut Rusadi Kantaprawira merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (Abdulkarim & Ratnaningsih, 2012). Sementara menurut Topf, budaya politik merupakan hal yang menyangkut kewajiban moral yang sejatinya berada di jantung masalah dari inti pembaharuan dan perubahan budaya. Pandangan Topf ini meyakini bahwa budaya politik merupakan proses yang dinamis dan terkait erat dengan perubahan sosial (Faulks, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, budaya politik dapat dipahami sebagai hal yang menentukan perilaku politik seseorang dan kelompok politik. Pilihan budaya politik tersebut mencerminkan kepentingan politik, pendekatan dan strategi politik yang digunakan dalam upaya untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik yang sudah ditetapkan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, persepsi dan lainnya secara holistik pada konteks khusus yang alamiah dengan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif berusaha untuk menjelaskan makna yang ada di balik fenomena individu, kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan dan persepsi. Penelitian kualitatif dimulai dengan membangun asumsi-asumsi dasar lalu dihubungkan dengan kaidah-kaidah pemikiran dalam penelitian, selanjutnya data yang dikumpulkan ditafsirkan oleh peneliti (M. Afdhal Chatra P, 2023, pp. 14–15). Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian kualitatif diyakini paling sesuai dengan tema penelitian yang diambil, yakni tentang fenomena politik yang berjalan dinamis.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam beberapa dekade terakhir, peran mahasiswa dalam organisasi politik telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Sebelumnya, organisasi mahasiswa umumnya berfokus pada kegiatan-kegiatan konvensional seperti seminar, diskusi, dan aksi demonstrasi di lapangan. Namun, dengan munculnya era digital, cara mahasiswa berorganisasi telah beradaptasi dan bertransformasi menjadi lebih dinamis dan inklusif.

Salah satu contoh konkret transformasi ini adalah munculnya komunitas mahasiswa yang menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya untuk menyusun strategi dan mobilisasi. Menurut hasil penelitian, terdapat kecenderungan banyak mahasiswa yang

lebih memilih media digital sebagai sarana untuk berkomunikasi dibandingkan dengan pertemuan tatap muka (Hakim, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa kini lebih efisien dalam mengorganisir diri mereka dan menyampaikan ide-ide mereka kepada publik.

Selain itu, banyak organisasi mahasiswa yang kini memiliki situs web dan akun media sosial resmi yang berfungsi sebagai *platform* untuk menyebarkan informasi dan menarik minat anggota baru. Misalnya, organisasi mahasiswa di Universitas Pamulang dan lainnya telah mengembangkan akun media sosial interaktif yang tidak hanya memberikan informasi tentang kegiatan, tetapi juga menyediakan forum diskusi bagi anggotanya. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya beradaptasi dengan teknologi, tetapi juga memanfaatkannya untuk memperluas jangkauan dan pengaruh mereka.

Transformasi ini juga menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan politik yang lebih luas. Dengan adanya akses informasi yang lebih mudah, mahasiswa dapat lebih cepat merespons isu-isu terkini dan mengambil tindakan yang diperlukan. Misalnya, gerakan *#MeToo* yang menjalar di seluruh dunia juga diadopsi oleh mahasiswa di Indonesia, yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan pengalaman mereka dan mendukung satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga aktor aktif dalam perubahan sosial.

Namun, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Meskipun mahasiswa memiliki akses yang lebih baik ke informasi, mereka juga dihadapkan pada tantangan disinformasi dan berita palsu yang dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memiliki literasi digital yang baik agar dapat memilah informasi yang akurat dan relevan (Abdullah et al., 2025, p. 44). Dengan demikian, perubahan cara mahasiswa berorganisasi tidak hanya memperkaya pengalaman mereka, tetapi juga menuntut mereka untuk lebih kritis dalam menghadapi informasi yang tersedia.

Peran Media Sosial dalam Gerakan Politik Mahasiswa

Saat ini, media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam mobilisasi mahasiswa di era digital. Dengan jutaan pengguna aktif di berbagai *platform*, seperti Facebook, Twitter (X), dan Instagram, mahasiswa dapat dengan mudah menyebarkan informasi dan menggalang dukungan untuk berbagai isu. Data dari *Data Reportal* menunjukkan bahwa Indonesia pada Januari 2025 memiliki sekitar 143 juta pengguna media sosial atau setara 50,2 % populasi, yang menjadikannya sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia (*Data Reportal*, 2025). Ini memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk memanfaatkan *platform* tersebut dalam upaya mobilisasi politik.

Contoh dari hal tersebut, gerakan mahasiswa yang menuntut pengesahan RUU Omnibus Law pada tahun 2020 menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk mengorganisir aksi protes. Melalui tagar seperti *#ReformasiDikorupsi* dan *#TolakOmnibusLaw*, mahasiswa berhasil menarik perhatian publik dan media internasional terhadap isu ini. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai *platform* untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting.

Lebih jauh lagi, media sosial memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan individu di luar kampus. Misalnya, mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta bersatu dalam sebuah gerakan yang disebut "Koalisi Mahasiswa Jakarta" (*Tempo.co*, 2014) untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Protes atau disfungsi sosial ini dapat terus terjadi selama masih ada ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dengan kehendak masyarakat (Pebiani et al., 2025, p. 2). Melalui media sosial, mereka dapat memperluas jaringan dan menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga meningkatkan dampak dari aksi mereka.

Namun, penggunaan media sosial juga membawa tantangan tersendiri. Aktivitas di media sosial sering kali dihadapkan pada risiko pengawasan dan represi dari pihak berwenang. Beberapa mahasiswa mengalami intimidasi dan ancaman karena pendapat mereka yang disampaikan di *platform* publik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami batasan hukum dan etika dalam menggunakan media sosial untuk menghindari konsekuensi negatif.

Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana untuk membangun solidaritas dan dukungan di antara mahasiswa. Dalam konteks ini, mahasiswa dapat saling berbagi pengalaman,

informasi, dan strategi untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai ruang bagi mahasiswa untuk tidak hanya berpartisipasi dalam diskusi politik, tetapi juga untuk menyatukan suara mereka dalam menghadapi isu-isu yang relevan, ini mencerminkan pembentukan budaya politik yang baru di kalangan mahasiswa.

Kemudian, era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara mahasiswa mengakses informasi dan pendidikan politik. Saat ini anak muda Indonesia sudah akrab dengan penggunaan internet, termasuk di antaranya mahasiswa. Kemudahan akses ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh informasi terkini mengenai isu-isu politik, kebijakan publik, dan perkembangan sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Misalnya, *platform-platform* media sosial telah menjadi sumber utama bagi mahasiswa untuk mengikuti berita dan diskusi politik.

Selain itu, banyak universitas di Indonesia yang kini menawarkan kursus *online* dan seminar mengenai politik dan kebijakan publik yang dapat diakses secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Hal ini menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta cara berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.

Namun, meskipun akses informasi semakin mudah, tantangan yang perlu dihadapi tetap ada. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya, dan mahasiswa perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik untuk memilah informasi yang valid dari yang tidak. Sebab, sebagian informasi yang beredar di media sosial adalah *hoax* atau disinformasi. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk mengintegrasikan literasi media dalam kurikulum mereka agar mahasiswa dapat berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam diskusi politik.

Selanjutnya, kemudahan menyampaikan pendapat merupakan salah satu aspek penting dari partisipasi politik di era digital. Dengan adanya media sosial, mahasiswa kini memiliki *platform* yang lebih luas untuk mengekspresikan pandangan mereka secara lebih mudah, murah, dan fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang dapat mempengaruhi opini publik.

Sebagai contoh, gerakan *#ReformasiDikorupsi* yang muncul di media sosial pada tahun 2019 menunjukkan bagaimana mahasiswa dapat mengorganisir diri dan menyuarakan pendapat mereka terhadap isu-isu yang dianggap penting. Melalui tagar tersebut, mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia bersatu untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Gerakan ini berhasil menarik perhatian media dan publik, serta memicu diskusi yang lebih luas mengenai reformasi politik di Indonesia.

Namun, meskipun media sosial memberikan *platform* untuk menyampaikan pendapat, ada juga risiko yang harus dihadapi. Banyak mahasiswa yang mengalami intimidasi atau persekusi karena pandangan politik mereka, terutama jika pandangan tersebut bertentangan dengan pemerintah. Bahkan riwayat postingan mereka di media sosial dapat dijadikan dalih untuk menjerat mahasiswa tersebut sehubungan dengan aktivitas politik yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kebebasan berekspresi di kalangan mahasiswa.

Keberadaan *platform* digital juga memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi dan membangun jaringan dengan aktivis dan organisasi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Ini dapat meningkatkan daya tawar mahasiswa dalam mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya, upaya membangun kolaborasi antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa dari negara lain dalam forum internasional, yang memungkinkan mereka dapat berbagi pandangan, pengalaman dan strategi dalam memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat secara global.

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa pengaruh era digital terhadap partisipasi dan pola interaksi mahasiswa sangat besar. Dengan akses informasi yang lebih baik dan kemudahan dalam menyampaikan pendapat, mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam mendorong perubahan sosial dan politik untuk kepentingan masyarakat umum. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi aktif mahasiswa dalam politik.

Kekuatan Politik Mahasiswa di Era Digital

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di era digital ini mahasiswa telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan teknologi untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Ada banyak contoh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, antara lain gerakan *#BlackLivesMatter* yang merambah ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun gerakan ini berakar di Amerika Serikat, mahasiswa di Indonesia turut berpartisipasi dalam memprotes ketidakadilan rasial dan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui *platform* media sosial seperti Twitter (X) dan Instagram, mahasiswa menyebarkan informasi, mengorganisir aksi, dan membangun solidaritas dengan gerakan global.

Contoh lainnya adalah gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 2019 di Indonesia, ketika mahasiswa dari berbagai universitas bersatu untuk menolak RUU yang dianggap bermasalah. Melalui tagar seperti *#ReformasiDikorupsi*, mahasiswa berhasil menarik perhatian publik dan media. Dalam waktu singkat, gerakan ini menjadi viral di media sosial, dengan ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat mereka. Dalam kurun waktu tersebut terlihat betapa kuatnya suara mahasiswa dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Selain itu, gerakan mahasiswa di era digital juga terlihat dalam kampanye lingkungan hidup. Misalnya, gerakan *Fridays for Future* yang dipelopori oleh aktivis muda Greta Thunberg telah menginspirasi mahasiswa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk beraksi. Mahasiswa menggunakan *platform* digital untuk mengedukasi masyarakat tentang perubahan iklim dan pentingnya keberlanjutan.

Kemudian, gerakan mahasiswa di era digital juga ditandai dengan penggunaan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram untuk mengorganisir pertemuan dan aksi. Dengan adanya teknologi ini, mahasiswa dapat berkomunikasi secara efisien dan cepat, sehingga memungkinkan mereka untuk merespons isu-isu politik yang muncul dengan lebih sigap. Misalnya, ketika terjadi isu penangkapan aktivis, mahasiswa dapat dengan cepat mengorganisir aksi solidaritas dalam waktu singkat.

Dengan demikian, dari contoh gerakan mahasiswa di era digital tersebut, terlihat jelas bahwa mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen informasi dan agen perubahan. Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong perubahan sosial yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar sebagai kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan di era digital ini.

Dari berbagai macam gerakan politik mahasiswa lewat media sosial, telah terbukti mampu memberikan dampak yang signifikan, baik dalam hal mobilisasi massa maupun dalam mempengaruhi opini publik. Media sosial telah menjadi alat yang ampuh bagi mahasiswa untuk menyampaikan pesan politik dan menciptakan kesadaran tentang isu-isu penting. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran utama bagi mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi politik.

Salah satu dampak positif dari gerakan mahasiswa di media sosial adalah peningkatan partisipasi politik di kalangan generasi muda. Melalui kampanye *online*, mahasiswa dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam aksi nyata. Misalnya, dalam gerakan *#SaveKPK*, mahasiswa berhasil menggali dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk *influencer* dan selebriti, yang turut menyuarakan pendapat mereka di media sosial (Tempo.co, 2015).

Namun, tidak semua dampak gerakan mahasiswa di media sosial bersifat positif. Munculnya berita palsu dan disinformasi di *platform* media sosial dapat merusak kredibilitas gerakan. Sebagai contoh, selama aksi demonstrasi, sering kali beredar informasi yang tidak akurat mengenai kekerasan dan tindakan represif oleh aparat. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, gerakan mahasiswa di media sosial juga menghadapi tantangan dari pemerintah. Beberapa pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan kebijakan yang membatasi penggunaan media sosial selama aksi demonstrasi. Tindakan ini bertujuan untuk mengendalikan informasi dan mencegah mobilisasi massa. Namun, mahasiswa tetap menemukan cara untuk mengatasi pembatasan tersebut, seperti menggunakan VPN untuk mengakses *platform* yang diblokir. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki daya juang yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak mereka di era digital.

Namun, secara keseluruhan dampak gerakan mahasiswa di media sosial sangat kompleks. Meskipun ada tantangan dan risiko, mahasiswa telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan dan perubahan sosial. Dengan terus beradaptasi dan mengembangkan strategi, mahasiswa di era digital dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam membentuk masa depan bangsa.

Kemudian, peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam konteks politik telah lama diakui, baik di Indonesia maupun secara global. Di era konvensional, mahasiswa sering kali diidentikkan dengan gerakan demonstrasi dan aksi protes di jalanan. Misalnya, pada tahun 1998, mahasiswa Indonesia memainkan peran kunci dalam reformasi yang menggulingkan rezim Orde Baru. Mereka menggunakan metode konvensional seperti rapat umum, penyebaran *pamflet*, dan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi politik mereka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peran mahasiswa di era digital mengalami transformasi yang signifikan. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya menjadi peserta aktif dalam aksi fisik, tetapi juga memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana berdiskusi dan untuk menyuarakan pendapat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa kini memiliki akses yang lebih luas dan cepat untuk menyebarkan informasi dan mobilisasi massa.

Perubahan ini juga terlihat dalam cara mahasiswa berinteraksi dengan isu-isu politik. Di era digital, mahasiswa lebih cenderung menggunakan kampanye *online*, petisi digital, dan forum diskusi di media sosial untuk mengadvokasi perubahan. Contoh nyata adalah gerakan *#BlackLivesMatter* yang mendapatkan dukungan luas dari mahasiswa di seluruh dunia melalui *platform* seperti Twitter (X) dan Instagram. Di Indonesia, gerakan *#ReformasiDikorupsi* yang muncul pada tahun 2019 juga menunjukkan bagaimana mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Namun, meskipun ada banyak keuntungan dalam penggunaan *platform* digital, tantangan juga muncul. Misalnya, informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak terverifikasi dan dapat menyebabkan disinformasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan literasi media di kalangan mahasiswa agar mereka dapat menavigasi informasi dengan bijak.

Dengan demikian, perbandingan antara peran mahasiswa di era konvensional dan digital menunjukkan bahwa mahasiswa kini memiliki alat yang lebih kuat untuk mempengaruhi politik. Mereka tidak lagi terbatas pada aksi fisik, tetapi juga dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan ide-ide dan mobilisasi secara lebih efektif. Namun, tantangan dalam bentuk disinformasi dan berita palsu harus diatasi agar mahasiswa dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang konstruktif dalam masyarakat.

Kemudian, perubahan peran mahasiswa dari era konvensional ke digital membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik nasional. Pertama, mahasiswa kini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui advokasi *online*. Dengan memanfaatkan media sosial, mereka dapat mengumpulkan dukungan untuk isu-isu tertentu dan menekan pemerintah untuk bertindak. Misalnya, gerakan mahasiswa yang menuntut penanggulangan perubahan iklim di Indonesia telah berhasil menarik perhatian media dan pemerintah. Menurut laporan catatan akhir tahun *change.org*, pada 2021 petisi yang bertemakan isu lingkungan berhasil mengumpulkan dukungan dari lebih 500 ribu warganet (Change.org, 2022).

Kedua, keterlibatan mahasiswa dalam politik digital juga menciptakan ruang bagi munculnya suara-suara baru yang sebelumnya terpinggirkan. Dalam konteks ini, mahasiswa perempuan dan kelompok minoritas memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarakan pendapat mereka. Saat ini partisipasi perempuan dalam politik cenderung meningkat seiring dengan penggunaan media sosial sebagai *platform* untuk advokasi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi jembatan bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan bagi politik nasional. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, polarisasi politik menjadi lebih nyata. Mahasiswa sering kali terjebak dalam *echo chambers*, di mana mereka hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka. Misalnya, pengguna media sosial di Indonesia yang cenderung hanya mengikuti akun yang memiliki pandangan politik yang sama dengan mereka. Hal ini jika dibiarkan dapat menghambat dialog konstruktif dan memperburuk potensi perpecahan yang ada di masyarakat.

Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam politik digital juga menghadapi risiko penindasan. Banyak mahasiswa yang mengalami intimidasi atau ancaman ketika menyuarakan pendapat mereka secara *online*. Banyak aktivis muda di Indonesia yang melaporkan mengalami ancaman atau kekerasan yang diduga terkait dengan aktivitas mereka di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan peluang baru, tantangan dalam bentuk penindasan tetap ada.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa perubahan peran mahasiswa di era digital memiliki implikasi yang kompleks terhadap politik nasional. Meskipun ada peluang untuk meningkatkan partisipasi dan keberagaman suara, tantangan seperti polarisasi dan penindasan harus diatasi agar mahasiswa dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang efektif dan konstruktif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Strategi Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa di Era Digital

Selanjutnya, untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam politik di era digital, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, penting untuk mengembangkan program pendidikan politik yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan tinggi. Pendidikan ini harus mencakup literasi media, pemahaman tentang sistem politik, dan keterampilan advokasi. Melalui pendidikan politik yang efektif maka partisipasi pemilih di kalangan pemuda dapat ditingkatkan dengan lebih maksimal. Sebab, dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme politik, mahasiswa dapat lebih termotivasi untuk terlibat dalam perjuangan dan proses politik.

Kedua, kampus dapat berfungsi sebagai pusat mobilisasi dengan mengadakan forum diskusi dan seminar tentang isu-isu politik terkini. Kegiatan ini dapat mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan bertukar pandangan, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan politik. Misalnya, kampus yang memiliki fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dapat secara rutin mengadakan seminar politik yang melibatkan mahasiswa, akademisi, dan praktisi, yang diharapkan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa.

Ketiga, kolaborasi antara mahasiswa dan organisasi masyarakat (*civil society*) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memperkuat suara mahasiswa dalam politik. LSM sering kali memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat membantu mahasiswa dalam kampanye advokasi mereka (Al-Ra'zie, 2025). Sebagai contoh, kerja sama antara mahasiswa dan Greenpeace Indonesia dalam kampanye lingkungan telah menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan di tingkat lokal. Dengan membangun kemitraan yang kuat, mahasiswa dapat memperluas jangkauan dan dampak dari inisiatif mereka.

Keempat, penting untuk memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan *platform* yang aman bagi mahasiswa untuk berbagi pendapat dan pengalaman politik. Misalnya, aplikasi berbasis komunitas dapat dikembangkan untuk memungkinkan mahasiswa berdiskusi dan mengorganisir kegiatan politik secara lebih efektif. Melalui penggunaan aplikasi komunitas diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan politik menjadi lebih tinggi.

Terakhir, dukungan dari pemerintah dan institusi pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Di antaranya, kebijakan yang mendukung kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap aktivis muda harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan politik. Diketahui bahwa negara-negara yang memberikan dukungan terhadap aktivisme pemuda cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi di kalangan generasi muda.

Dengan demikian, lewat penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan keterlibatan mahasiswa dalam politik di era digital dapat mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi secara positif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat untuk masa depan yang lebih terjamin.

D. Penutup

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mahasiswa harus memiliki kepekaan terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat, mahasiswa tidak boleh berada di menara gading yang hanya nyaman tinggal dalam ruang-ruang kelas dan gedung kampus, mereka harus terhubung langsung dengan masyarakat, merasakan apa yang dirasakan masyarakat, mengetahui apa yang dihadapi dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Pada konteks pengawasan tersebut, di era konvensional contoh konkret kekuatan politik mahasiswa adalah gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Kemudian di luar negeri misalnya di China pada tahun 1989 terdapat unjuk rasa besar Rakyat di Lapangan Tiananmen.

Kemudian, di era digital kekuatan politik mahasiswa bisa berperan dalam mobilisasi gerakan melalui *platform* media sosial yang sangat akrab dengan mahasiswa generasi ini. Seperti gerakan tagar di *platform* X (eks twitter) dan instagram, termasuk penggunaan istilah-istilah khusus, mengubah lirik lagu, membuat gambar dan aktivitas kreatif lain sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Gerakan politik digital tersebut dapat berlanjut menjadi gerakan riil demonstrasi konvensional di jalanan yang dapat membawa efek lebih jauh.

Gerakan mahasiswa sebagai kekuatan politik di era digital tidak bisa dipandang remeh dan dampaknya bisa lebih besar dibandingkan gerakan konvensional. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, namun gerakan mahasiswa melalui ruang digital mampu membuat isu yang diperjuangkan tetap hangat dan keterjangkauannya pun bisa semakin meluas selama masyarakat terhubung dengan internet. Ini merupakan gerakan politik yang bersenyawa dengan semangat zaman.

Daftar Pustaka

- Abdulkarim, A., & Ratnaningsih, N. (2012). Budaya Politik, Partisipasi Politik dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia. *Sistem Politik Indonesia*, 1.3.
- Abdullah, S., Sutopo, S., Al-Ra'zie, Z. H., Azizah, S., Krisnawati, L. H., Nugroho, A., Ardiansyah, M., Susanto, S., Sariwardani, A., & Nurfaisal, M. D. (2025). *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://books.google.co.id/books?id=KHBEEQAAQBAJ>
- Al-Ra'zie, Z. H. (2025). LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI KEKUATAN POLITIK. *Ensiklopedia of Journal*, 7(2), 150–158. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2799>
- Al Khanza, R., Retno, R., Pradana, R. A., & Ihsan, M. I. (2024). Mahasiswa dan Intelektual Sebagai Kekuatan Politik: Studi Atas Penolakan Kebijakan UU Ciptakerja. *Journal Politique*, 4(1), 117–129.
- BBC News. (2019). *Tiananmen 1989: Apa yang terjadi dalam unjuk rasa besar di China dan bagaimana rakyat kini memaknainya?* BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48508542>
- BBC News, I. (2022). *Demo 11 April: Perang tagar #MahasiswaBergerak dan #SayaBersamaJokowi warnai aksi mahasiswa tolak penundaan Pemilu 2024*. BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61057508>
- Change.org. (2022). *Tahun 2021, Hampir Satu Juta Warganet Menangkan Petisi di Change.org*. <https://www.change.org/l/id/tahun-2021-hampir-satu-juta-warganet-menangkan-petisi-di-change-org>
- Data Reportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Devi, R. W. S. (2019). *Gejayan Memanggil dan Aksi Pergerakan Mahasiswa di Yogyakarta*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4717325/gejayan-memanggil-dan-aksi-pergerakan-mahasiswa-di-yogyakarta>
- Dudi Akbar, M. M., & Samudera, W. (2018). *Jemari Jadi Kepal: Secuil Cerita Gerakan Mahasiswa 98 - Dudi Akbar, MM - Google Buku*. warna samudera. <https://books.google.co.id/books?id=z1FTDwAAQBAJ&pg=PA8&dq=kepal&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi1h7TwnNfaAhURT48KHeZ9DLIQ6AEIJzAA#v=onepage&q=kepal&f=false>
- Dudih Sutrisman, S. P. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. GUEPEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=0-aEDwAAQBAJ>
- Edy Herry Pryhantoro, M., & Sopyan, Y. (2016). *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Spasi. https://books.google.co.id/books?id=PPB_CwAAQBAJ
- Fatamala, A. P., & Nurgiansah, T. H. (2023). Kekuatan Politik Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Terhadap Kebijakan Pemerintahan Dalam Sistem Politik. *Jurnal PPKn*, 11(1), 74–81. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Faulks, K. (2021). *Sosiologi Politik: Budaya Politik*. Nusamedia.

- <https://books.google.co.id/books?id=GTJxEAAAQBAJ>
Fresky, M. A. (2020). *Mahasiswa : Leader of Change*. GUEPEDIA.
<https://books.google.co.id/books?id=R285EAAAQBAJ>
- Haboddin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. UB Press.
<https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ>
- Hakim, L. (2020). Pemilihan platform media pembelajaran online pada masa New Normal. *Justek: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(2), 27–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/justek.v3i2.3516>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2012). UU RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Undang Undang*, 18.
- M. Afdhal Chatra P, et al. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=yp7NEAAAQBAJ>
- Michael Brown. (2024). *Demonstrasi di Kampus AS Meluas, Ketua DPR Desak Rektor Mundur*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/demonstrasi-di-kampus-as-meluas-ketua-dpr-desak-rektor-mundur/7585409.html>
- Pebiani, M., Rosidin, A., & Al-Ra'zie, Z. H. (2025). Melihat yang Tak Terlihat: Ilmu Sosial Membongkar Rutinitas dan Kebiasaan Sosial. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(1), 1–4.
<https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/440>
- Purboadji, A. (2015). *Demokrasi Kuat: Mimpi Buruk Koruptor*. PT Elex Media Kumputindo.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cYIKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=partai+politik+representasi+modal+politik+dinasti+politik+kompetisi+pemilu+politik+lokal&ots=_1DQAM1sdF&sig=qcBDs7b16isvQdE3DXg2lzZUHDE
- Tempo.co. (2014). *Unjuk Rasa Koalisi Mahasiswa Jakarta*.
<https://data.tempo.co/foto/detail/P0306201400330/unjuk-rasa-koalisi-mahasiswa-jakarta>
- Tempo.co. (2015). *Gerakan Save KPK*. <https://data.tempo.co/foto/detail/P2202201515486/gerakan-save-kpk>
- Tim detikcom. (2023). *Babak Akhir Mario Dandy saat Rafael Alun Mulai Diadili*. Detik.Com.
<https://news.detik.com/berita/d-6910976/babak-akhir-mario-dandy-saat-rafael-alun-mulai-diadili%0A>
- Yahya, A. N. (2023). *Serupa Nasib Rafael Alun, Eks Kepala Bea Cukai Makassar Jadi Tersangka Bermula Ulah Sang Anak*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/05/16/12304931/serupa-nasib-rafael-alun-eks-kepala-bea-cukai-makassar-jadi-tersangka?page=all%0A>